

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Lampiran I.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris²⁾ PT/Perusahaan Umum Daerah/Perusahaan Perseroan Daerah/Koperasi²⁾ BPR BKD.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris²⁾ PT/Perusahaan Umum Daerah/Perusahaan Perseroan Daerah/Koperasi²⁾ BPR BKD sebagai berikut:

1) Calon Anggota Direksi:

Nama	Jabatan
.....
.....

2) Calon Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan
.....
.....

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Pemilik BPR BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.
- ^{*)} Pengajuan permohonan ini dapat digabungkan dalam satu surat dengan pengajuan permohonan yang lain.

Lampiran ...

Lampiran I.2

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN CALON ANGGOTA DIREKSI BPR BKD

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1	Daftar susunan anggota Direksi BPR BKD;		
2	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Direksi berupa:		
	a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;		
	b. daftar riwayat hidup;		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan		
	d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;		
3	Contoh tanda tangan dan paraf masing-masing calon anggota Direksi;		
4	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Lembaga Keuangan;		

d. tidak ...

	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	f. tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-bank, dan/atau lembaga lain;		
	g. memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;		
	h. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.		
5	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;		
6	Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;		
7	Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non-perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;		
8	Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan calon anggota Direksi.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Pemilik BPR BKD

Lampiran I.3

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR BKD

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris BPR BKD;		
2	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Dewan Komisaris berupa:		
	a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;		
	b. daftar riwayat hidup;		
	c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; dan		
	d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;		
3	Contoh tanda tangan dan paraf masing-masing calon anggota Dewan Komisaris;		
4	Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan, bagi calon anggota Dewan Komisaris;		
5	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti		

	melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Lembaga Keuangan;		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	f. tidak merangkap jabatan sebagai:		
	1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau		
	2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;		
	g. memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;		
	h. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.		
	i. bersedia untuk mempresentasikan hasil		

	pengawasan terhadap BPR BKD apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;		
6	Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Pemilik BPR BKD.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana